

ANALISIS RASIO PENDAPATAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017- 2020

Rahmat Arfan¹, Geta Ambartiasari², Indra Akbar³, Nurvira Nanda⁴

^{1,3,4}Politeknik Kutaraja

²Universitas Serambi Mekkah

Corresponding Author: rahmatarfan@poltekkutaraja.ac.id

Article History

Received: 05-04-2023

Revised: 09-04-2023

Accepted: 11-04-2023

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan; Rasio Derajat Desentralisasi; Rasio Kemandirian; Rasio Ketergantungan

Keywords:

Decentralization Degree Ratio; Dependency Ratio; Financial Performance; Independence Ratio

ABSTRAK:

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rasio pendapatan melalui rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Banda Aceh. Pendekatan dalam tulisan ini berupa pendekatan deskriptif yaitu analisa yang dilaksanakan dengan cara menyajikan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh berupa data-data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui media publikasi.

Hasil pada tulisan ini menghasilkan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh belum begitu baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan derajat desentralisasi dianggap belum baik karena kriteria cukup, Pada rasio ketergantungan daerah menunjukkan kriteria sangat baik, Pada rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria rendah.

ABSTRACT:

This paper aims to analyze the ratio of income through the ratios of the degree of decentralization, the ratio of regional dependence, and the ratio of regional independence to measure the regional financial performance of Banda Aceh City. The paper approach is in the form of a descriptive approach, namely, the analysis is carried out by presenting data received from the Banda Aceh City Financial Management Agency (BPKK) in the form of Budget Realization Report (LRA) data through publication media. The results in this paper indicate that the performance of the Banda Aceh Municipal Government has not been good due to several factors. The ratio of the degree of decentralization shows that the City Government of Banda Aceh's performance in carrying

out the degree of decentralization is considered not good because the criterion is sufficient, the regional dependency ratio shows the criteria very well, and the ratio of regional independence shows the criteria is low.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1999 sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan lingkungan yang strategis, hal ini didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki wewenang, kewajiban dan hak terhadap daerahnya untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan bentuk upaya dari pemerintah pusat dalam memberikan hak dan wewenang untuk dapat mengelola pembangunan dan kemandirian daerahnya agar mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Christia & Ispriyarso, 2019). Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 menyebutkan tentang Otonomi Daerah yang berbunyi “Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, selain menyebutkan otonomi daerah, dalam Undang-Undang diatas juga menerangkan tujuan daripada otonomi daerah yang disebutkan dalam ayat 3 yaitu “ Menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah”. Pemerintah daerah diharapkan agar dapat membangun suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah, pengelolaan pada masing-masing daerah diharapkan agar dapat terbentuknya akuntabilitas kinerja daerah, hal ini juga berkaitan dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah baik dalam pengelolaan keuangan serta pengelolaan lainnya

Keberhasilan pada kinerja keuangan pemerintah daerah di ukur berdasarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga memperoleh pendapatan dan kontribusi daerah pada setiap tahun (Antari & Sedana, 2018). Salah satu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan suatu daerah yang diperoleh dari sumber daya alam atau sumber lainnya dimana hal ini dapat menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu membangun ukuran kinerja pemerintahan yang baik.

Salah satu pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah adalah Provinsi Aceh. Sebagai daerah provinsi, Aceh dapat dikatakan merupakan daerah yang bersifat istimewa sehingga diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri baik urusan pemerintahan daerah Aceh dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan Aceh sebagai daerah keistimewaan tertuang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota”.

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dituntut untuk dapat memiliki kemandirian daerah yang lebih dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	Rp. 1.244.415.059.119,00
2018	Rp. 246.272.150.484,71
2019	Rp. 235.123.074.164,05
2020	Rp. 277.747.620.343,43

Sumber: LRA Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 pada Tahun 2017-2020 PAD Kota Banda Aceh mengalami penurunan pada tiap tahunnya, nilai ini akan sangat mempengaruhi tingkat kemandirian Kota Banda Aceh. Semakin rendah PAD, maka tingkat kemandirian semakin menurun sehingga ketergantungan daerah yang semakin tinggi (Wulandari, 2017).

Hal ini tentu berpengaruh tinggi terhadap kinerja keuangan daerah Kota Banda Aceh baik pada indikator masukan, meliputi pembangunan infrastruktur, pada indikator manfaat, meliputi tingkat kepuasan masyarakat serta indikator *impact*, meliputi peningkatan kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Muarif dan Indriani (2015-2017) melakukan penelitian serupa terkait pengukuran kinerja keuangan Provinsi Aceh. Dalam pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan pada tulisan ini, maka perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan Kota Banda Aceh melalui analisis rasio pendapatan. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan otonomi daerah, hal ini menyebabkan penurunan PAD Kota Banda Aceh akan berdampak pada kinerja keuangan Kota Banda Aceh.

Latar belakang masalah muncul dari beberapa penjelasan yaitu tentang Bagaimana analisis rasio pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada Kota Banda Aceh ditinjau melalui rasio derajat desentralisasi? Kemudian Bagaimana analisis rasio pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada Kota Banda Aceh ditinjau melalui rasio kemandirian daerah? Selanjutnya tentang Bagaimana analisis rasio pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada Kota Banda Aceh ditinjau melalui rasio ketergantungan daerah?

LANDASAN TEORI

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu pencapaian pengelolaan baik pada sasaran ataupun tujuan keuangan daerah sebagai penerapan visi, misi dan strategi suatu daerah untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan program dan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Nasution, 2018). Dalam hal ini, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pada masing-masing daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup pada tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan daerah baik penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007 dalam Wulandari, 2017) yaitu: a) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembangunan daerah. b) Memperbaiki sistem kinerja untuk periode pemerintah daerah berikutnya. c) Memberikan informasi atau pertimbangan dalam pembuatan keputusan. d) Menciptakan akuntabilitas publik. dan e) Pengalokasian sumber daya serta beberapa potensi yang dimiliki daerah.

Adapun manfaat pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah yaitu (Machmud, 2014): a) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. b) Mengevaluasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. c) Tolak ukur pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi dan hukuman sesuai dengan sistem pengukuran kinerja keuangan yang telah disepakati, d) Tolak ukur dalam rangka memperbaiki kinerja antara pimpinan dan bawahan pemerintah daerah, e) Mempermudah dalam pengambilan keputusan secara obyektif.

Kemudian Indikator kinerja keuangan daerah (Wulandari, 2017) meliputi: a) Indikator Input (Jumlah kebutuhan dana, Jumlah kebutuhan pegawai, Jumlah pembangunan infrastruktur, Jumlah penggunaan waktu). b) Indikator Proses (Keikutsertaan regulasi pada peraturan perundang-undangan, Jangka waktu untuk memproduksi atau menghasilkan jasa). c) Indikator Keluaran (Jumlah jasa dan sumber daya alam yang dihasilkan, Ketepatan memproduksi jasa dan sumber daya alam), d) Indikator Hasil (Kualitas jasa dan sumber daya alam yang diproduksi, Produktivitas para pimpinan dan pegawai), e) Indikator manfaat (Tingkat kepuasan masyarakat, Tingkat partisipasi masyarakat), f) Indikator Impact (Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat

Kinerja keuangan yang baik didasari pada laporan keuangan yang jelas dan terukur, Suatu laporan yang dapat memberikan informasi dan gambaran keuangan yang dilakukan proses akuntansi dalam periode tertentu sebagai pertimbangan dalam suatu keputusan dan digunakan sebagai alat transfer informasi oleh pihak yang membutuhkan (Suteja, 2018). Laporan keuangan daerah merupakan laporan terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sebagai alat untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah selaku wakil rakyat yang dapat digunakan sebagai informasi baik untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan lainnya.

Penyusunan laporan keuangan daerah bertujuan untuk menunjukkan pelaporan keuangan yang akuntabilitas sehingga dapat dipercaya dan menyajikan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan serta dapat mengetahui posisi keuangan daerah dalam kenaikan dan penurunan yang berkaitan dengan sumber penerimaan, pengeluaran termasuk pungutan pajak, pinjaman dan mengetahui kesesuaian dalam mendapatkan sumber daya ekonomi serta alokasi anggaran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan.

Adapun manfaat dan fungsi laporan keuangan daerah (Wulandari, 2017) adalah Memberikan informasi keuangan daerah untuk memprediksi dan menentukan serta perubahan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sudah dan akan terjadi, Memberikan informasi keuangan untuk penganggaran dan perencanaan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, Layanan publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi, kualitas pelayanan, biaya dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Kebutuhan informasi oleh kelompok politik sebagai pengawasan, mencegah dan penyelewengan keuangan pemerintah daerah, Kebutuhan informasi investor dan kreditor dalam menghitung level resiko berinvestasi dan kondisi finansial sebuah daerah.

Pada laporan keuangan daerah akan sangat di pengaruhi dari anggaran yang telah di tetapkan sehingga kemudian muncul Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai bentuk hasil akhir dari laporan kuangan dan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber keuangan yang dikelola, pengalokasian

dana dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019).

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk menerapkan dasar-dasar penyajian LRA dan memenuhi tujuan akuntabilitas bagi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberi manfaat dalam Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, ketaatan entitas pelaporan serta akuntabilitas terhadap anggaran, Sebagai alat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam periode mendatang, Sebagai informasi dalam perolehan penerimaan dan pengeluaran sumber daya ekonomi. (Yovita dan Utomo, 2011)

Hasil laporan Realisasi Anggaran kemudian dapat dianalisa sebagai pembuat kesimpulan antara realisasi anggaran berdasarkan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah hasil yang dilaksanakan dalam laporan keuangan dengan mengurangi pos-pos laporan serta melihat hubungan antar komponen agar dapat menemukan informasi yang jelas mengenai keuangan dan dapat menentukan suatu keputusan (Suteja, 2018). Analisis laporan keuangan menjadi hal penting dalam memberikan informasi dan menentukan keputusan mengenai keuangan. Adapun tahapan dalam melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah, maka perlu memahami tahapan dan berbagai metode menganalisis laporan keuangan.

Analisa laporan keuangan juga dapat dilakukan pada laporan keuangan daerah dimana pendapatan daerah menjadi pokok utama analisa. Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang di dapatkan oleh suatu daerah dan menjadi modal dasar dalam mengelola, membangun serta memenuhi belanja daerah untuk dapat memperkecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Maita, 2020). Pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan serta kewajiban dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah. Pendapatan daerah yang telah diakui dalam penambahan nilai kekayaan di suatu daerah, maka akan ditetapkan sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan daerah memiliki beberapa sumber pendapatan, Pada sumber pendapatan daerah (Kawatu, 2019) adalah sebagai berikut: a) Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah). b) Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus). c) Lain-lain pendapat yang sah.

Dari beberapa pendapat yang telah di jabarkan, terdapat pula beberapa analisa pendapat daerah yang dapat dilakukan melalui reralisasi laporan anggaran (Harahap, 2019) seperti: a). Analisis *varians* (selisih) anggaran pendapatan, b) Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, c) Menghitung rasio pendapatan, d) Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan

Pada analisa rasio pada keuangan daerah terdapat beberapa rasio yang dianalisa yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Kontribusi BUMD.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data tulisan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder. Perolehan data sekunder melalui data-data publikasi berupa LRA atau data lainnya yang dibutuhkan.

Pengumpulan data yang diperoleh adalah data keuangan yang menjadi masalah pokok dan materi tulisan ini sebagai pendukung data tulisan yang berkaitan dengan gambaran umum Kota Banda Aceh dan LRA Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 pada kantor Badan

Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dan teknik analisa yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah.

Analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan pada objek dan menghitung data LRA serta menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Banda Aceh baik pada indikator masukan, meliputi pembangunan infrastruktur, pada indikator manfaat, meliputi tingkat kepuasan masyarakat serta indikator *impact*, meliputi peningkatan kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan lainnya. Adapun analisis melalui rasio pendapatan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah, Adapun untuk rasio dan cara analisa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016) dalam Kawatu (2019)

2. Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016) dalam Kawatu (2019)

Dengan hasil perhitungan akan dianalisa dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Kriteria Penilaian

Derajat Desentralisasi	Presentase %
Sangat Kurang	0% - 10%
Kurang	11% - 20%
Cukup	21% - 30%
Sedang	31% - 40%
Baik	41% - 50%
Sangat Baik	>51%

Sumber: Halim (2014) dalam Esti (2021)

3. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016) dalam Kawatu (2019)

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kemamdirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Presentase %
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Halim (2014) dalam Tanan & Duri (2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banda Aceh ialah laporan yang menjabarkan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit serta pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang kemudian diperbandingkan dengan anggarannya.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai tahun 2020:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi Jumlah (Rp.)	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi Jumlah (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah	280.877.031.733	270.170.805.366	271.470.773.450	246.272.150.484
Pendapatan Transfer	752.803.451.000	737.750.392.419	902.895.534.786	861.791.849.037
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	252.539.575.756	236.493.861.334	43.502.600.000	27.850.599.999
Total Pendapatan	1.286.220.058.489	1.244.415.059.119	1.217.868.908.236	1.135.914.599.521
Belanja Operasi	644.514.371.755	581.634.257.047	1.045.671.605.282	945.743.102.355
Belanja Modal	701.804.067.489	643.608.867.250	106.417.868.151	100.757.750.369
Belanja Tak Terduga	500.000.000	-	900.000.000	-
Total Belanja	1.346.318.439.244	1.225.243.124.28	1.152.989.473.433	1.046.500.852.724
Penerimaan Daerah	68.098.380.755	60.098.380.755	81.706.315.576	81.706.315.575
Pengeluaran Daerah	8.300.000.000	8.300.000.000	14.236.000.000	14.236.000.000
Total Pembiayaan	60.098.380.755	60.098.380.755	67.470.315.576	67.470.315.575
SILPA	-	79.270.315.575	-	29.515.980.079

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi Jumlah (Rp.)	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi Jumlah (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah	289.778.308.636	235.123.074.164	254.081.184.909	227.747.620.343
Pendapatan Transfer	978.008.594.687	955.538.933.994	1.007.036.138.296	994.538.413.494
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	333.265.800.000	25.172.080.000	42.354.850.000	36.710.686.042
Total Pendapatan	1.301.052.703.323	1.215.834.088.158	1.303.472.173.205	1.258.996.719.879
Belanja Operasi	1.182.052.703.323	1.215.834.088.158	1.007.308.980.263	947.212.358.597
Belanja Modal	165.540.898.936	148.964.382.238	223.963.267.785	194.607.303.024
Belanja Tak Terduga	-	-	6.380.713.860	4.664.549.372
Total Belanja	1.182.117.004.262	1.088.763.331.629	1.237.652.961.908	1.146.484.210.994
Penerimaan Daerah	30.369.553.139	30.369.553.139	72.354.595.399	36.499.603.370
Pengeluaran Daerah	4.653.573.060	3.800.000.000	4.653.573.060	3.800.000.000
Total Pembiayaan	25.715.980.079	26.569.553.139	67.710.022.399	32.699.603.370
SILPA	-	12.354.595.399	-	19.349.907.594

Berdasarkan Tabel 4.1 menjelaskan bahwa LRA Kota Banda Aceh menjelaskan, Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan. Pendapatan yang diperoleh Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan serta penurunan baik dari segi dianggarkan maupun terealisasi, sehingga dapat digolongkan pada tingkatan yang belum baik. Pendapatan Kota Banda Aceh berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan yang dimiliki Kota Banda Aceh yang mana meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai kebutuhan daerahnya yang meliputi : Transfer Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi : Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Lainnya-LRA.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{270.170.805.366}{1.244.415.059.119} \times 100\% \\ &= 21.71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{246.272.150.484}{1.135.914.599.521} \times 100\% \\ &= 21.68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{235.123.074.164}{1.215.834.088.158} \times 100\% \\ &= 19.34\% \end{aligned}$$

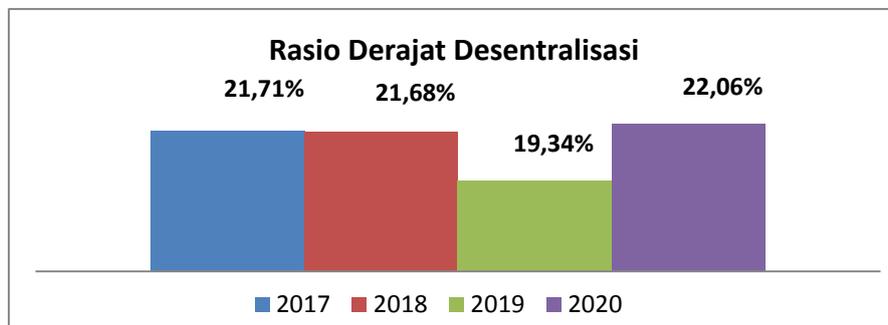
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{277.747.620.343}{1.258.996.719.879} \times 100\% \\ &= 22.06\% \end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja Kinerja Derajat Desentralisasi Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tabel sebagai Berikut:

Tabel 4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Persentase Derajat Desentralisasi	Kriteria
2017	270.170.805.366	1.244.415.056.119	21.71%	Cukup
2018	246.272.150.484	1.135.914.599.521	21.68%	Cukup
2019	235.123.074.164	1.215.834.088.158	19.34%	Kurang
2020	277.747.620.343	1.258.996.719.879	22.06%	Cukup

Sumber: Data diolah (2022)



Gambar 4.1 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi
Sumber: Data Diolah (2022)

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Perhitungan Rasio Ketergantungan Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 sebagai berikut:

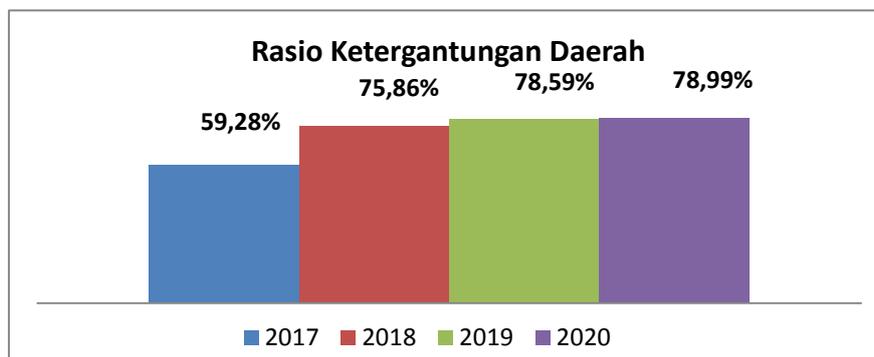
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{737.750.392.419}{1.244.415.059.119} \times 100\% \\ &= 59.28\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{861.719.849.037}{1.135.914.599.521} \times 100\% \\ &= 75.86\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{955.538.933.994}{1.215.834.088.158} \times 100\% \\ &= 78.59\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{994.538.413.494}{1.258.996.719.879} \times 100\% \\ &= 78.99\% \end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja Kinerja Ketergantungan Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tabel sebagai Berikut:

Tabel 4.5 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase Derajat Desentralisasi	Kriteria
2017	737.750.392.419	1.244.415.059.119	59.28%	Sangat Baik
2018	861.719.849.037	1.135.914.599.521	75.86%	Sangat Baik
2019	955.538.933.994	1.215.834.088.158	78.59%	Sangat Baik
2020	994.538.413.494	1.258.996.719.879	78.99%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah (2022)



Gambar 4.2 Grafik Rasio Ketergantungan Daerah
Sumber: Data Diolah (2022)

3. Rasio Kemandirian Daerah

Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 sebagai berikut:

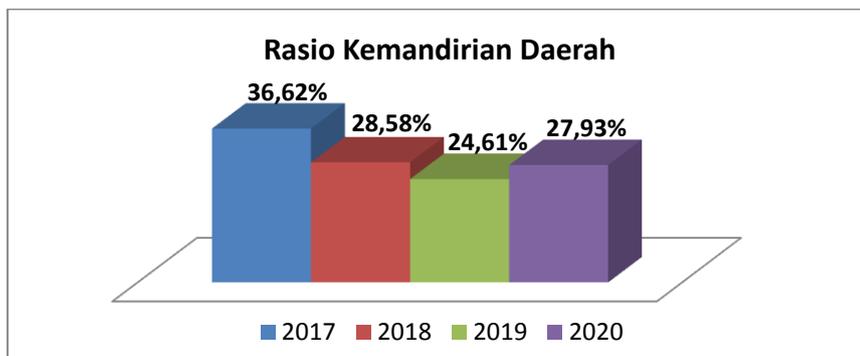
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{270.170.805.366}{737.750.392.419} \times 100\% \\ &= 36.62\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{246.272.150.484}{861.719.849.037} \times 100\% \\ &= 28.58\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{235.123.074.164}{955.538.933.994} \times 100\% \\ &= 24.61\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{277.747.620.343}{994.538.413.494} \times 100\% \\ &= 27.93\% \end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja Kemandirian Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tabel sebagai Berikut:

Tabel 4.7 Rasio Kemandirian Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Persentase Derajat Desentralisasi	Kriteria
2017	270.170.805.366	737.750.392.419	36.62%	Rendah
2018	246.272.150.484	861.719.849.037	28.58%	Rendah
2019	235.123.074.164	955.538.933.994	24.61%	Rendah Sekali
2020	277.747.620.343	994.538.413.494	27.93%	Rendah

Sumber: Data diolah (2022)



Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Daerah
Sumber: Data Diolah (2022)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 termasuk pada kriteria cukup, pada posisi kriteria tersebut, peran pemerintah daerah masih sangat kurang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah. Faktor yang

terjadi pada Kota Banda Aceh yang menyebabkan rendahnya rasio desentralisasi adalah rendahnya pendapatan asli daerah yaitu tercerminnya penentuan target pendapatan asli daerah.

2. Rasio Ketergantungan daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 termasuk pada kriteria sangat baik, hal ini tergolong pada kriteria yang sangat tinggi angka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat dapat dikatakan lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri hal ini disebabkan dengan meningkatnya transfer pusat setiap tahunnya yang semakin tinggi dan menurunnya pendapatan asli daerah.
3. Rasio Kemandirian daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 termasuk pada kriteria rendah, rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan Kota Banda Aceh terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi, hal ini disebabkan dengan meningkatnya transfer pusat setiap tahunnya yang semakin tinggi dan menurunnya pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya rasio kemandiriannya yaitu kurang berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal dan sumber daya manusia yang kurang terampil dalam pengelolaan sumber daya alam.

KESIMPULAN

Setelah dilakukannya analisis data di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi yang di analisis untuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 menggambarkan kriteria cukup dengan presentase 21% - 30%. Meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah. Pada rasio derajat desentralisasi yaitu diperlukan upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi, menumbuhkan kesadaran wajib pajak/retribusi untuk membayar pajak, memperbaiki pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat umum.
2. Rasio ketergantungan daerah yang di analisis untuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 menggambarkan kriteria sangat baik dengan presentase >51%. Meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan rasio rasio ketergantungan daerah yaitu diperlukan upaya menciptakan sektor perdagangan, manufaktur, jasa dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang sudah ada agar dapat dikembangkan dengan baik sehingga meningkatkannya penerimaan daerah dan mengurangi pembiayaan dan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat maupun pihak eksternal lainnya.
3. Rasio kemandirian daerah yang di analisis untuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 menggambarkan kriteria rendah dengan presentase 26% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan Kota Banda Aceh dalam upaya membiayai kegiatan pemerintahannya terhadap pemerintah pusat atau pihak eksternal. Meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan rasio kemandirian daerah yaitu diperlukan upaya menciptakan sektor perdagangan, manufaktur, jasa dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang sudah ada agar dapat dikembangkan dengan baik sehingga meningkatkannya penerimaan daerah dan mengurangi pembiayaan dan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat maupun pihak eksternal lainnya.
4. Diharapkan Pemerintah Kota dapat meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan jangan mengharapkan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat, jika hal ini tidak dilakukan evaluasi dengan baik, maka Pemerintah Kota Banda Aceh kedepannya akan sulit berkembang tanpa bantuan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- [2] Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- [3] Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform, 15(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- [4] Demora, V. (2016). *Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5 (Vol 5 No 1).
- [5] Fadhillah, R. A., Sugianto, S., & Yafiz, M. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Komitmen Terhadap Efektivitas Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Deli Serdang*. Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 3(2).
- [6] Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV. IRDH. Purwokerto.
- [7] Harahap, S.S. (2019). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- [8] Heryana, A. (2020). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Erlangga, Jakarta, June.
- [9] Ilham, M. (2020). 13 *Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli dan Definisi Secara Umum*. MateriBelajar.Co.Id, 1–8.
- [10] Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Angkasa. Jakarta.
- [11] Kawatu, F.S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- [12] Machmud, M. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-*
- [13] 2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi, 14(2)*.
- [14] Mahmudi. (2011) “*Manajemen Keuangan Daerah*” Jakarta : PT Erlangga.
- [15] Maita, A. (2020). *Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Satu Pintu*. MBIA, 18(3). <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.755>
- [16] Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). *Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1).
- [17] Maulida. (2020). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian*. Darussalam, 21, 71–78.
- [18] Muarif, M., & Indriani, M. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(4), 618-634.
- [19] Nasution, D, A.D. (2018). *Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah*. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan.
- [20] Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*. ACCOUNTABILITY, 6(1), 45-56.
- [21] Rahayu, R. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Kota Jambi*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 3(1), 59-66.
- [22] Risky, Y. T., Agrijanti, A., & Inayati, N. (2019). *Uji Screening Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Menggunakan Antibiotik Cefoxitin (fox) 30 µg Pada*

- Pasien Penderita Abses Gigi di Klinik BPJS Mataram*. Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS), 6(2), 98. <https://doi.org/10.32807/jambs.v6i2.140>
- [23] Sani, A., & Muda, W. (2017). *Otonomi Daerah Esensi Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Dipetik Mei, 5, 2020.
- [24] Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya*. In *Zifata* (Issue September). <https://books.google.co.id/books?id=gcO9DwAAQBAJ&pg=PA17&dq=sugiyono+2017&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi15Iuw5ePpAhXTdCsKHVAzDOMQ6AEIMDAB#v=onepage&q=analisis regresi&f=false>
- [25] Suteja, I. G. N. (2018). *Analisis kinerja keuangan dengan metode altman z-score pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk*. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 12-17.
- [26] Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). *Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)*. Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 6(1), 91-101.
- [27] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah.
- [28] Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 tentang Otonomi Daerah.
- [29] Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Aceh.
- [30] Wulandari, S. (2017). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Efisiensi Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation).
- [31] Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).